

DAMPAK PARIWISATA DI KAWASAN PANTAI PADANG TERHADAP MANAJEMEN RISIKO BENCANA GEMPA DAN TSUNAMI

Meity Intan Suryadi ¹⁾, Liza Enzelluthfiah ²⁾, Haya Shaliha Amalia ³⁾, Wiwik Dwi Pratiwi ⁴⁾

Prodi Perencanaan Kepariwisata Institut Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia
^{1,2,3,4)}

Corresponding Author:

meityintan@gmail.com ¹⁾

Abstrak

Mitigasi risiko bencana pada industri pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan dan keamanan destinasi pariwisata maupun industri pariwisata secara keseluruhan. Kawasan strategis sepanjang Pantai Padang memiliki pengaruh yang besar dalam pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak pariwisata di kawasan Pantai Padang terhadap manajemen risiko bencana gempa bumi dan tsunami berdasarkan tahapan manajemen penanggulangan bencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan statistik, berita, dan dokumen kebijakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pariwisata di kawasan Pantai Padang memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan manajemen risiko bencana gempa dan tsunami di Kota Padang. Semakin tinggi tingkat kunjungan wisatawan pada objek wisata, semakin tinggi pula risiko yang akan dihadapi. Di kawasan Pantai Padang terdapat infrastruktur, sarana, dan prasarana penunjang evakuasi bencana sebagai upaya mitigasi. Selain itu, telah dilakukan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dan wisatawan di kawasan Pantai Padang melalui kolaborasi *stakeholder*.

Kata Kunci: Dampak Pariwisata, Pantai Padang, Manajemen Risiko Bencana

Abstract

Disaster risk mitigation in the tourism industry has a prominent role in maintaining the sustainability and security of tourism destinations and the tourism industry as a whole. The strategic area along Padang Beach has an important influence on environmental preservation and disaster mitigation. This research aims to identify the impact of tourism in the Padang Beach area on earthquake and tsunami disaster risk management based on the stages of disaster management. This research uses a qualitative descriptive approach through literature study. Data were obtained from scientific journals, books, statistical reports, news, and policy documents. The results of this research show that tourism activities at Padang Beach area have a significant impact on the implementation of earthquake and tsunami disaster risk management in Padang City. The higher level of tourist visits to tourist attractions, the higher risks they will face. In the Padang Beach area, there are infrastructure, facilities, and infrastructure to support disaster evacuation as a mitigation effort. On the other hand, community and tourist preparedness have been strengthened in the Padang Beach area through stakeholder collaboration.

Keywords: *Tourism Impact, Padang Beach, Disaster Risk Management*

PENDAHULUAN

Industri pariwisata telah menjadi industri dengan pertumbuhan tercepat di era modern. Jumlah ini telah tumbuh 56 kali lipat antara tahun 1950 dan 2018, bahkan selama pandemi Covid-19, kontribusi langsung perjalanan dan pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) global adalah US\$4,7 triliun (Hsu & Sharma, 2022). Pasca pandemi, pertumbuhan pariwisata diperkirakan akan semakin meningkat (Abbas, et al., 2021). Dampak globalnya terhadap pembangunan ekonomi, sosial dan berkelanjutan semakin mendapat pengakuan luas (Scheyvens & Biddulph, 2018). Setelah berakhirnya status pandemi Covid-19 yang diumumkan Presiden secara resmi pada bulan Juni 2023, tingkat kunjungan wisatawan di beberapa daerah Indonesia mengalami peningkatan, salah satunya Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat.

History:

Received : 25 Februari 2024

Revised : 10 Juli 2024

Accepted: 28 Agustus 2024

Published: 31 Agustus 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Kota Padang terletak di pantai barat Pulau Sumatera yang memiliki beragam daya tarik wisata alam, wisata sejarah, wisata kuliner, wisata belanja, dan wisata konvensi. Objek wisata unggulan Kota Padang diantaranya Kawasan Kota Tua Batang Arau, Masjid Raya Sumatera Barat, dan Pantai Padang yang berada di sisi barat. Selain itu, terdapat pula objek wisata di kawasan timur Kota Padang yaitu Goa Kelelawar, Air Terjun Lubuk Tampuruang, Kampung Adat Gunung Sariak, Agro Wisata Lubuk Minturun. Dalam skala lokal, pariwisata di kota Padang mengalami pertumbuhan selama satu dekade dari tahun 2013 sampai 2023 dengan jumlah rata-rata kunjungan per tahun wisatawan mancanegara sebanyak 47.913 dan wisatawan lokal sebanyak 3.453.458 (BPS Kota Padang, 2024). Dalam mengimbangi pesatnya pertumbuhan pariwisata dan arus wisatawan, rencana strategis perlu dikembangkan untuk memitigasi risiko di destinasi tertentu (Goh, 2012).

Mulia (2021) berpendapat bahwa perkembangan pesat dalam bidang pariwisata dapat menimbulkan dampak positif dan negatif pada sektor ekonomi, sosial budaya, serta lingkungan. Dampak buruk akibat dari kegiatan pariwisata harus diantisipasi dan dikelola dengan baik oleh pemerintah, pelaku wisata, dan masyarakat. Cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif pariwisata salah satunya dengan menerapkan manajemen pengunjung sebagai langkah administratif untuk menjaga kelestarian lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi tanpa mengesampingkan kepuasan wisatawan. Manajemen pengunjung dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur akses wisata berdasarkan wilayah atau zonasi, menetapkan biaya masuk bagi wisatawan, menetapkan dan mensosialisasikan kode etik pengunjung.

Terletak di pesisir barat Pulau Sumatera, Kota Padang terhubung langsung dengan Samudera Hindia sehingga terdapat ombak yang cukup besar sehingga dapat menimbulkan gelombang ekstrim dan abrasi. Peristiwa alam yang mengakibatkan pengikisan pantai ini ditemukan di wilayah Kota Padang yang banyak berhubungan langsung dengan lautan, karena umumnya pantai di Kota Padang adalah pantai pasir yang terdiri dari kawasan feldspar (BNPB, 2013). Kawasan strategis sepanjang Pantai Padang mempunyai pengaruh penting dalam pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana (Perda Kota Padang No. 4/2012).

Berdasarkan data pada Katalog Tsunami BMKG, tercatat beberapa kejadian tsunami di Sumatera Barat, yaitu pada tahun 1797, 1833, 1904, dan 1935. Selain itu, pemodelan tsunami BMKG menunjukkan bahwa panjang gelombang tsunami dapat mencapai ketinggian lebih dari 10 meter di pesisir Kota Padang akibat skenario terburuk gempa Magnitudo M8,9 dengan waktu tsunami mencapai daratan kurang dari 30 menit (BMKG, 2019). Masyarakat Kota Padang perlahan menyadari bahwa di pesisir pantai yang termasuk kategori zona merah ancaman tsunami memiliki risiko yang tinggi untuk dihuni. Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk konsentrasi hunian ke arah timur Kota Padang diluar zona rendaman tsunami guna meminimalisir dampak gempa dan tsunami.

Dalam industri pariwisata, manajemen bencana dan risiko didefinisikan sebagai perencanaan dan implementasi proses yang bertujuan untuk mengelola bencana dan risiko di destinasi pariwisata (Robertson, *et al.*, 2006). Menurut Buku Pegangan United Nations Environment Program (UNEP) tentang Manajemen Risiko Bencana di Pariwisata Pesisir, manajemen risiko bencana mencakup: mengidentifikasi risiko bahaya, menilai kerentanan masyarakat terhadap risiko, mengembangkan rencana kesiapsiagaan dan mitigasi, melaksanakan rencana tersebut, memantau, mengevaluasi, merevisi dan memperbarui rencana perbaikan berkelanjutan (Shurland & de Jong, 2008). Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dampak pariwisata di kawasan Pantai Padang terhadap manajemen risiko bencana gempa bumi dan tsunami berdasarkan tahapan manajemen penanggulangan bencana.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur, yaitu melalui tabulasi beberapa literatur dan dibuat sintesis terhadap data yang didapatkan. Tujuan penelitian kualitatif yaitu melibatkan eksplorasi makna dan kerangka kontekstual, sehingga menawarkan perspektif yang komprehensif dan rumit ke dalam sudut pandang pihak-pihak yang terlibat (Creswell & Poth, 2017). Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur (*literature review*) dengan sumber : jurnal ilmiah, buku, laporan statistik, berita, dan dokumen kebijakan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan sumber pengumpulan data. Sumber data yang berasal dari buku akan dilakukan analisis menggunakan parafrasa. Langkah dalam parafrasa dengan menemukan inti dari isi teks sub bab dalam buku yang sudah dibaca serta menemukan berbagai permasalahan dari teks tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pariwisata merupakan kegiatan multi sektor dan multi disiplin yang saling terkait satu sama lain. Menurut Robertson, Kean, & Moore (2006) dalam Boong, et al. (2019), pada sektor ekonomi, industri pariwisata dapat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan; sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi daerah; membuka dan memperluas peluang lapangan pekerjaan; memfasilitasi perdagangan; peluang penanaman modal asing dan penambahan devisa; meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan stabilitas nasional. Dalam perkembangan pariwisata di Indonesia, Pratiwi (2004) menjelaskan bahwa secara sosial budaya, pariwisata menyediakan fasilitas dan layanan rekreasi, budaya, dan komersial untuk digunakan oleh wisatawan maupun oleh penduduk. Namun di kawasan *resort*, wisatawan dipisahkan dari masyarakat lokal karena perbedaan budaya (pakaian, bahasa, pakaian, adat istiadat, perilaku) dan perbedaan aktivitas yang terjadi di dalam dan luar *resort* (kegiatan rekreasi di kawasan *resort*). Daerah *resort* memiliki komunitas pariwisata yang berperan dalam perdagangan serta hubungan sosial yang diatur oleh komunitas tersebut, sehingga membatasi interaksi sosial wisatawan dan penduduk lokal lainnya. Meskipun tidak selalu menjadi faktor terpenting atau satu-satunya yang menarik wisatawan untuk berkunjung, namun faktor lingkungan dan alam memegang peranan penting mengapa calon wisatawan memilih destinasi wisata untuk dikunjungi. Lingkungan alam sebagai penunjang pariwisata, rentan terhadap perubahan yang dapat dipengaruhi oleh sifat lingkungan fisik tersebut yang rapuh dan tidak terpisahkan (Tangian & Kumaat, 2020). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Manajemen bencana merupakan suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitas dan rekonstruksi bencana. Tahapan manajemen bencana terbagi menjadi pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Pada tahapan pra bencana yaitu sebelum terjadi bencana, perlu dilakukan manajemen risiko bencana melalui kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Pada tahapan tanggap darurat yaitu ketika terjadi bencana, dilakukan manajemen kedaruratan seperti mengaktifkan sistem peringatan dini dan proses evakuasi. Kemudian pada tahapan pasca bencana yaitu setelah terjadi bencana, dilakukan manajemen pemulihan berupa upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.

Gambar 1. Tahapan Manajemen Penanggulangan Bencana



Sumber: Ginanjar, 2018

Pada Pasal 26 UU Nomor 24 Tahun 2007, disebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana; memperoleh pelatihan dan keterampilan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana; memperoleh informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana. Selanjutnya pada Pasal 27, setiap orang wajib untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat luas tentang penanggulangan bencana. Dalam hal berwisata ke suatu tempat, pengunjung atau wisatawan memiliki hak untuk merasa aman dan berkewajiban dalam menjaga lingkungan.

Pengembangan destinasi wisata dalam skala besar tanpa kesiapsiagaan bencana dapat meningkatkan risiko dan potensi dampak kerugian dan korban bencana di masa depan. Perencanaan pengembangan pariwisata tahan bencana sangat penting untuk mengelola dan mengurangi risiko bencana tersebut. Terkait dengan pariwisata, mitigasi risiko bencana juga mencakup pengembangan perangkat keamanan di sektor pariwisata, penerapan sistem manajemen kelangsungan usaha, dan penerbitan peraturan mengenai manajemen krisis di bidang pariwisata. Semua ini bertujuan untuk meminimalkan risiko dan dampak bencana terhadap industri pariwisata. Oleh karena itu, mitigasi risiko bencana pada industri pariwisata mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan dan keamanan destinasi pariwisata maupun industri pariwisata secara keseluruhan (Bong, et al., 2019).

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012, Risiko bencana adalah potensi kerugian yang mungkin diakibatkan oleh suatu bencana di suatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu, yang dapat mencakup kematian, cedera, penyakit, ancaman terhadap nyawa, kehilangan keselamatan, pengungsian, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Dalam hal mengidentifikasi potensi kerugian akibat bencana, diperlukan kajian risiko bencana meliputi kajian tingkat ancaman; kajian tingkat kerentanan; kajian tingkat kapasitas; kajian tingkat risiko bencana; kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan hasil kajian dan peta risiko bencana.

Dalam pengkajian kerentanan bencana, terdapat komponen kerentanan yaitu kerentanan ekonomi, sosial, fisik, dan lingkungan. Indikator yang digunakan untuk kerentanan sosial adalah kepadatan penduduk dan kelompok rentan. Dalam kajian kerentanan sosial di destinasi pariwisata, wisatawan diperhitungkan menjadi bagian dari kepadatan penduduk di suatu destinasi. Hal ini dilakukan agar *stakeholder* terkait memiliki kesiapan untuk peningkatan kapasitas dalam perencanaan evakuasi tidak hanya bagi masyarakat sekitar namun juga mempertimbangkan banyaknya wisatawan. Dari segi ekonomi pariwisata berdampak juga pada kajian kerentanan ekonomi dimana sektor pariwisata dinilai sebagai salah satu penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang menjadi salah satu pengukuran kajian kerentanan ekonomi destinasi. Selain itu, pengembangan industri pariwisata juga berdampak pada kerentanan fisik akibat pengembangan fasilitas dan infrastruktur pariwisata.

Wahyuni, et al., (2020) menyatakan bahwa dari beberapa misi yang dimiliki oleh Wali Kota Padang, salah satu hal terkait pariwisata adalah meningkatkan pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan. Tingginya risiko bencana gempa dan tsunami

Kota Padang dapat menimbulkan ketakutan dan rasa tidak nyaman ketika berkunjung. Diperlukan strategi untuk dapat meningkatkan kapasitas Kota Padang sebagai destinasi wisata tangguh bencana dengan pelibatan dan kolaborasi *stakeholder* terkait. Saat terjadinya bencana, pengimplementasian penanganan bencana yang terjadi di destinasi memerlukan kesiapan dari para pihak yang terlibat di lokasi bencana (Yumantoko, 2019). Panjang garis pantai Kota Padang mencapai 84 km dengan luas keseluruhan Kota Padang adalah 694,96 km². Terdapat beberapa pantai, diantaranya ada Pantai Air Manis, Pantai Nirwana, dan Pantai Pasir Jambak yang tergolong pantai pendek serta Pantai Padang yang tergolong pantai panjang. Jika dibandingkan dengan pantai lain, Pantai Padang memiliki pengunjung relatif lebih ramai karena posisinya terletak di pusat kota dan kawasan strategis, sehingga upaya mitigasi bencana relatif lebih lengkap (Ghafiqi, 2017).

Gambar 2. Kawasan Pantai Padang



Sumber: pariwisata.padang.go.id

A. Manajemen Risiko Bencana Gempa dan Tsunami di Kawasan Pantai Padang

Pada zaman dahulu, bencana alam dianggap sebagai kejadian yang datang tiba-tiba dan tidak bisa diprediksi. Namun seiring perkembangan zaman, dengan ilmu pengetahuan dan pemanfaatan teknologi, kejadian bencana alam dapat diprediksi dan risiko yang akan dihadapi dapat diminimalisir. Perairan Sumatera Barat terletak di Lempeng Indo-Australia dan Eurasia sehingga berpotensi menimbulkan guncangan bawah laut. Pada wilayah daratan Sumatera Barat terdapat patahan/sesar Semangko. Patahan ini menyimpan 7 segmen dengan potensi gempa bumi, yakni Segmen Angkola, Segmen Barumun, Segmen Sumpur, Segmen Sianok, Segmen Sumani, Segmen Suliti, dan Segmen Siulak. Berdasarkan keadaan topografi, morfologi dan geologi, Kota Padang memiliki potensi bencana Longsor, Banjir dan banjir bandang, Badai, Gempa, dan Tsunami. Pasca bencana gempa dan tsunami Aceh tahun 2004, ancaman gempa bumi dan tsunami menjadi kekhawatiran seluruh *stakeholder* di Kota Padang. Gempa bumi berkekuatan 8,5 SR yang dimulai di Pulau Nias pada bulan Maret 2005 diikuti oleh gempa berkekuatan 6,9 SR di sekitar Laut Mentawai pada bulan April 2005; gempa berkekuatan 6,3 SR di sekitar Danau Singkarak pada bulan Maret 2007; gempa bumi berkekuatan 8,4 SR dan 7,9 SR di perairan sekitar Bengkulu dan Sumatera Barat pada tanggal 12 dan 13 September 2007; dan gempa bumi berkekuatan 7,6 SR pada 30 September 2009 di lepas pantai Sumatera dan sekitar 50 kilometer barat laut kota Padang membuat trauma masyarakat Sumatera Barat. Selain itu, ahli seismologi menyatakan bahwa masih terdapat potensi terjadinya gempa raksasa berikutnya (*giant earthquake*) di sekitar Mentawai (Pemkot Padang, 2013).

Sesuai hasil penilaian tingkat risiko, Kota Padang memiliki tingkat risiko yang tinggi untuk bencana gempa dan tsunami, baik probabilitasnya maupun dampak yang akan ditimbulkan (Pemkot Padang, 2013). Kota Padang telah memiliki beberapa dokumen kebijakan atau peraturan terkait bencana, diantaranya:

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana di Kota Padang;
2. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang;

3. Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Tsunami Kota Padang;
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030;
5. Rencana Kontinjensi Menghadapi Bencana Tsunami Kota Padang Tahun 2013;
6. Keputusan Walikota Padang Nomor 389 Tahun 2014 Tentang Forum Kelompok Siaga Bencana Periode 2014-2017;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018–2038;
8. Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024;
10. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang tahun 2019-2024.

Dokumen kebijakan berupa peraturan daerah bukan hanya sebagai langkah administratif dalam pengurangan risiko bencana, namun juga dapat menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur kota yang mempertimbangkan risiko bencana. Beberapa aksi nyata yang telah dilakukan *stakeholder* Kota Padang sebagai upaya mengurangi risiko bencana antara lain:

1. BPBD Kota Padang melaksanakan Uji Rencana Kontinjensi Bencana Tsunami Kota Padang. Kegiatan ini diselenggarakan selama 4 hari pada tanggal 12 s.d. 15 November 2019 di Rocky Hotel didampingi oleh para narasumber, fasilitator nasional, dan fasilitator daerah.
2. BPBD Kota Padang menginisiasi Program Pasar Cerdas Bencana. Kegiatan ini diselenggarakan selama 3 hari pada tanggal 29 s.d. 30 November 2019 di Hotel Axana untuk perwakilan komunitas Pasar Raya Padang, Pasar Gaung, dan Pasar Lubuk Buaya. Program ini ditujukan untuk peningkatan kesiapsiagaan komunitas pasar. Pasar Raya Padang merupakan salah satu pusat aktivitas perekonomian yang berada di kawasan pariwisata Kota Padang yang biasa menjadi tempat wisatawan membeli cinderamata dan mencicipi beragam kuliner.
3. Pengukuhan dan Pelatihan Kelompok Siaga Bencana (KSB). KSB merupakan relawan sosial yang diberi mandat oleh BPBD dalam melakukan upaya mitigasi bencana guna mengurangi risiko bencana yang terjadi di wilayahnya (Syahyanti & Frinaldi, 2020). Diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat dalam program penanggulangan risiko bencana. Relawan yang terlatih dapat melakukan respon tanggap darurat ketika terjadi bencana di daerahnya. Dalam keadaan tidak terjadi bencana, relawan ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat dan wisatawan untuk lebih waspada dan dapat melakukan evakuasi mandiri. Hal ini tentunya akan sangat membantu BPBD secara kelembagaan yang jumlah personelnnya sangat terbatas.
4. Dinas Pariwisata Kota Padang melaksanakan kegiatan Pengembangan Pariwisata Berbasis Mitigasi Bencana yaitu Badan Penyelamat Wisata Tirta (BALAWISTA). Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas para relawan keamanan dan mengurangi jumlah korban kecelakaan dan bencana. Kegiatan diselenggarakan selama 3 hari pada tanggal 19 s.d. 21 februari 2020 di Hotel Grand Inna yang diikuti oleh 40 peserta.
5. BPBD Kota Padang menyediakan perlengkapan anggota BALAWISTA, sarana informasi berupa baliho mengenai bencana dan rambu petunjuk jalur evakuasi, serta *shelter* yang dapat membantu masyarakat maupun wisatawan terkait informasi bencana dan mengetahui apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.

Gambar 3. Papan informasi dan rambu evakuasi



Sumber : Wahyuni, 2020

6. Pemerintah Kota Padang menyusun peta evakuasi Kota Padang untuk menginformasikan kepada masyarakat dan wisatawan mengenai arah dan jalur evakuasi. Peta ini membagi Kota Padang menjadi 6 sektor yaitu sektor I sampai sektor VI.
7. BPBD Provinsi Sumatera Barat menyediakan sarana dan prasarana kesiapsiagaan menghadapi bencana berupa Sirine Tsunami sebagai Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*). Beberapa contoh aset sirine tsunami di Kota Padang yaitu Sirine Kantor BPBD Provinsi, Sirine Dinas Kebudayaan Provinsi, Sirine Mercure Hotel, Sirine Bank Nagari, dan lain-lain. Terdapat pula Patriot-Net Project yaitu sistem peringatan dini bencana alam berbasis Internet of Things (IoT) yang dikembangkan Telkom University dan diimplementasikan pertama kali di Kota Padang.
8. Tersedia tempat evakuasi sementara di Kota Padang yang disebut *shelter*. Pada tahun 2020, jumlah *shelter* yang ada berjumlah 7 bangunan. Minimnya jumlah *shelter* dikarenakan keterbatasan anggaran, namun pemerintah berusaha melakukan kajian, perencanaan, dan memanfaatkan berbagai jenis bangunan yang telah tersedia seperti bangunan sekolah, bangunan universitas, dan bukit sebagai tempat evakuasi.
9. Tersedia jalur evakuasi dan rambu petunjuk evakuasi yang tersebar di berbagai daerah Kota Padang termasuk di Pantai Padang. Pada tahun 2020, jumlah rambu evakuasi berwarna oren berjumlah 290 rambu yang akan terus dilakukan penambahan oleh BPBD Kota Padang. Ghafiqi (2017) menyatakan bahwa infrastruktur kebencanaan di Pantai Padang relatif lebih lengkap dibandingkan dengan pantai lain di Kota Padang.

Tabel 1. Infrastruktur Kebencanaan di Pantai Kota Padang

No	Nama Pantai	Alarm Bahaya	Shelter	Rambu Evakuasi	Breakwater	Tower Pemantau	Jalur Evakuasi
1	Pantai Nirwana	-	-	-	-	-	V
2	Pantai Air Manis	V	-	-	-	V	V
3	Pantai Padang	V	V	V	V	-	V
4	Pantai Pasir Jambak	-	-	-	-	-	-

Sumber: Ghafiqi, 2017

10. Terdapat mitigasi struktural seperti pembangunan tanggul laut di tiga titik di Pantai Padang yaitu kawasan Masjid Al-Hakim, kawasan Tugu Merpati, dan kawasan Pasir Jambak, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai upaya pemerintah dalam pengurangan risiko dampak bencana.

Gambar 4. Tanggul laut Kota Padang



Sumber: Kompas.id

11. Kelurahan Purus dan Kelurahan Lolong Belanti resmi menjadi Tsunami Ready Community pada tanggal 30 September 2022 dan mendapatkan pengakuan The Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO (IOC/UNESCO). 12 indikator kesiapsiagaan tsunami dipetakan dan direncanakan untuk zona bahaya tsunami, untuk memperkirakan jumlah orang yang berisiko di zona bahaya tsunami, untuk mengidentifikasi sumber daya ekonomi, infrastruktur dan politik serta peta evakuasi tsunami yang mudah dipahami. Indikator lainnya seperti memiliki sarana yang memadai dan dapat diandalkan untuk menerima peringatan tsunami dari pihak berwenang yang berwenang dan memiliki sarana yang memadai dan dapat diandalkan untuk menyebarkan peringatan resmi tsunami 24 jam kepada masyarakat setempat secara tepat waktu.
12. BPBD Provinsi Sumatera Barat melakukan sosialisasi dan edukasi dalam program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di SMA Adabiah 2 Padang yang diikuti sekitar 700 peserta yang terdiri dari siswa dan majelis guru. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 13 Februari 2023.
13. Pihak penyedia jasa akomodasi turut terlibat dalam pembangunan hotel tahan gempa di Kota Padang seperti Fave Hotel, Whiz Prime Hotel, Amaris Hotel Padang, Hotel Ibis Padang, Kyriad Bumi Minang Hotel, Rocky Plaza Hotel, Mercure Hotel Padang, Premiere Basko Hotel, Hotel Santika Premiere, The ZHM Premiere Padang (Winsyah, 2023).
14. BPBD Kota Padang mengerahkan personel untuk Pos Pengamanan (PAM) dalam rangka memantau pengunjung di Pantai Padang pada pekan Hari Raya Idul Fitri 1445 H. Pusat pemantauan terletak di pantai dekat tugu IORA atau di Danau Cimpago. Stasiun PAM beroperasi pada tanggal 12 April 2024 sampai 16 April 2024. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Kawasan Pantai Padang mengalami peningkatan jumlah wisatawan khususnya pada libur lebaran.
15. Dan lain-lain.

Penerbitan kebijakan terkait bencana oleh Pemerintah Kota Padang menunjukkan bahwa telah dilakukan upaya mitigasi secara administratif dan komitmen pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana. Diharapkan pelaksanaan kebijakan yang telah disusun sesuai dengan target yang diinginkan dan tepat sasaran. Konsistensi *stakeholder* dalam edukasi risiko bencana gempa dan tsunami untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya di daerah pesisir Kota Padang harus terus dilakukan. Secara keseluruhan, kepedulian masyarakat Kota Padang terhadap kebencanaan semakin baik. Masyarakat yang peduli didominasi dari kalangan pelajar dan mahasiswa (Sari, et al., 2014). Manajemen risiko bencana alam gempa dan tsunami di Kota Padang telah dilakukan sesuai UU Nomor 24 Tahun 2007 melalui kesiapsiagaan dan mitigasi bencana dalam kegiatan identifikasi dan pemantauan risiko bencana; perencanaan penanggulangan bencana partisipatif; mengembangkan budaya sadar bencana; meningkatkan komitmen pelaku penanggulangan bencana; pengaturan penanggulangan bencana baik secara fisik dan non fisik, yang mempertimbangkan kegiatan pariwisata khususnya di Kawasan Pantai Padang.

SIMPULAN

Semakin tinggi tingkat kunjungan wisatawan pada objek wisata, semakin tinggi pula risiko yang akan dihadapi. Kegiatan pariwisata di Pantai Padang memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan manajemen risiko bencana gempa dan tsunami di Kota Padang. Hal ini dikarenakan pengembangan pariwisata di Kota Padang berpengaruh pada perhitungan kajian kerentanan destinasi wisata serta akan berpengaruh pada perencanaan peningkatan kapasitas Kota Padang sebagai destinasi wisata dalam menghadapi bencana. Sangat tepat jika *stakeholder* fokus pada peningkatan infrastruktur, sarana, dan prasarana penunjang evakuasi bencana serta penguatan kesiapsiagaan masyarakat dan wisatawan mengingat letak Pantai Padang yang berada di zona rawan bencana gempa dan tsunami sekaligus kawasan strategis Kota Padang. Tingkat pergerakan wisatawan dan masyarakat yang dinamis mengharuskan upaya edukasi terkait risiko bencana gempa dan tsunami dilakukan dengan konsisten serta berkelanjutan, sehingga pendatang baru maupun yang sudah lama berkegiatan di Pantai Padang memiliki pemahaman terkait risiko bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, J., et al. (2021). Exploring the impact of COVID-19 on tourism: transformational potential and implications for a sustainable recovery of the travel and leisure industry. *Current Research in Behavioral Sciences*, 2. <https://doi.org/10.1016/j.crbeha.2021.100033>
- Adams, D. O. (2021). *Cegah Abrasi dan Bentuk Pantai Baru, Mahyeldi Tinjau Tanggul Laut Pantai Padang*. Diakses dari https://sumbarprov.go.id/home/news/20255_pada_17_Mei_2024.
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2022). *BMKG Dorong Kota Padang Wujudkan Tsunami Ready Community, Tingkatkan Kesiapsiagaan Gempa dan Tsunami*. Diakses dari <https://bmkg.go.id/berita/?p=bmkg-dorong-kota-padang-wujudkan-tsunami-ready-community-tingkatkan-kesiapsiagaan-gempa-dan-tsunami&lang=ID&tag=padang> pada 15 Mei 2024.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2013). *Kajian Risiko Bencana Kota Padang Sumatera Barat 2014-2018*. Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2013.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang. (2019). *BPBD Kota Padang melaksanakan PAM Lebaran di Pantai Padang*. Diakses dari <https://bpbd.padang.go.id/konten/bpbd-kota-padang-melaksanakan-pam-lebaran-di-pantai-padang> pada 16 Mei 2024.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang. (2019). *BPBD Kota Padang mengadakan Uji Rencana Kontijensi Bencana Tsunami*. Diakses dari <https://bpbd.padang.go.id/konten/bpbd-kota-padang-mengadakan-uji-rencana-kontijensi-bencana-tsunami> pada 16 Mei 2024.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang. (2019). *BPBD Kota Padang Meluncurkan Program Pasar Cerdas Bencana*. Diakses dari <https://bpbd.padang.go.id/konten/bpbd-kota-padang-meluncurkan-program-pasar-cerdas-bencana> pada 16 Mei 2024.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat. (2023). *BPBD Sumbar Gelar Edukasi, Ratusan Siswa SMA Adabiah 2 Padang Ikut Simulasi Gempa dan Tsunami*. Diakses dari <https://bpbd.sumbarprov.go.id/home/news/334> pada 16 Mei 2024.
- Badan Pusat Statistik Kota Padang. *Kota Padang Dalam Angka 2024*.
- Bong, S., et al. (2019). *Manajemen Risiko, Krisis, & Bencana Untuk Industri Pariwisata Yang Berkelanjutan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell dan Poth. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications, Inc.

- Dinas Pariwisata Kota Padang. (2023). Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kota Padang, 2013 - 2023. Diakses dari <https://padangkota.bps.go.id/>. pada 11 Juni 2024.
- Fathani, A. T., et al. (2023). A systematical review of tourism disaster management: insights from Indonesian's journey. *E3S Web of Conferences* 464, The 2nd International Conference on Disaster Mitigation and Management. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202346405002>
- Ghafiqi, M. I. (2017). *Mitigasi Bencana Pada Daerah Wisata Pantai*. Skripsi Sarjana, Universitas Andalas. <http://scholar.unand.ac.id/30849/>
- Ginanjari, Y. C. (2018). Proses Penanggulangan Bencana. Diakses dari <https://bpbd.babelprov.go.id/proses-penanggulangan-bencana/> pada 15 Mei 2024.
- Goh, C. (2012). Exploring impact of climate on tourism demand. *Annals of Tourism Research*, 39(4), 1859-1883. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2012.05.027>
- Harona, R. S., & Alhadi, Z. (2020). Efektifitas Peran BPBD Kota Padang dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Kelompok Siaga Bencana (KSB). *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 2(2).
- Hasymi, E., Mardhi, H., & Yunanda, R. (2019). Pengurangan Risiko Bencana: Dampak StIRRDR di Kota Padang. Prosiding Seminar Nasional Pengurangan Risiko Bencana. Yogyakarta, 23-25 Juli 2019: Universitas Gadjah Mada kerjasama dengan GNS Science, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Hsu, J. L., & Sharma, P. (2022). Disaster and risk management in outdoor recreation and tourism in the context of climate change. *International Journal of Climate Change Strategies and Management*, 15, 712-728. <https://doi.org/10.1108/IJCCSM-10-2021-0118>
- Keputusan Walikota Padang Nomor 239 Tahun 2022 Tentang Destinasi Wisata Kawasan Timur Kota Padang.
- Keputusan Walikota Padang Nomor 389 Tahun 2014 Tentang Forum Kelompok Siaga Bencana Periode 2014-2017.
- Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
- Mulia, V. B. (2021). Memahami Dan Mengelola Dampak Pariwisata. *Jurnal Kepariwisataaan*, 20(1), 75-85. <https://doi.org/10.52352/jpar.v20i1.439>
- Pemerintah Kota Padang. Rencana Kontinjensi Menghadapi Bencana Tsunami Kota Padang Tahun 2013.
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana di Kota Padang.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024.
- Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.
- Peraturan Walikota Padang Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Tsunami Kota Padang.
- Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang.

- Pratiwi, W. D. (2004). *Tourism and built environment changes in traditional communities: Kuta and Nusa Dua, Bali, Indonesia as the case studies*. PhD thesis, University of Sheffield. uk.bl.ethos.419575
- Putri, A. M. (2024). *Mengenal Sesar Semangko, Sesar Raksasa Pembelah Pulau Sumatera*. Diakses dari <https://www.rri.co.id/iptek/715305/mengenal-sesar-semangko-sesar-raksasa-pembelah-pulau-sumatera> 16 Mei 2024.
- Rais, I. (2022). *Ditetapkan Sebagai Tsunami Ready Community, Dua Komunitas Siaga Bencana Dinilai UNESCO*. Diakses dari <https://www.padang.go.id/ditetapkan-sebagai-tsunami-ready-community-dua-komunitas-siaga-bencana-dinilai-unesco> 16 Mei 2024.
- Rifwan, F., & Rizqullah, A. (2021). Analisis Efektivitas Jalur Evakuasi Daerah Sektor 6 Peta Evakuasi Kota Padang. *CIVED Journal of Civil Engineering and Vocational Education*, 8(3), 129–132. <https://doi.org/10.24036/cived.v8i3.113858>
- Robertson, D., Kean, I., & Moore, S. (2006). *Tourism Risk Management: An Authoritative Guide to Managing Crises in Tourism*. Singapore: Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC).
- Sari, N. W., Sulandari, S., & Lituhayu, D. (2014). Mitigasi Gempa dan Tsunami di Kota Padang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 3(2). DOI: 10.14710/jppmr.v3i2.5127
- Scheyvens, R., & Biddulph, R. (2018). Inclusive tourism development. *Tourism Geographies*, 20(4), 589-609. DOI: 10.1080/14616688.2017.1381985
- Shurland, D. & de Jong, P. (2008). *Disaster Risk Management for Coastal Tourism Destinations Responding to Climate Change: A Practical Guide for Decision Makers*. France: United Nations Environment Programme.
- Syahyanti, C. & Frinaldi, A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Peran Kelompok Siaga Bencana Kelurahan Olo dalam Upaya Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami di Kawasan Pantai Padang. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 44 –53. DOI:10.24036/jmiap.v2i2.123.
- Tangian, D., & Kumaat, H. M. E. (2020). *Penulisan Buku Ajar Ber-ISBN Berjudul Pengantar Pariwisata*. Manado: Jurusan Pariwisata, Program Studi DIII Perhotelan, Politeknik Negeri Manado.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Wahyuni, E. S., Putera, R. E., & Yoserizal. (2020). Strategi Pemerintah Kota Padang dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Mitigasi Bencana. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 30(1), 49–60. DOI: 10.23917/jpis.v30i1.10826
- Winsyah. (2023). *Bikin Tidur Tenang! Inilah Deretan Hotel Termegah di Padang, Tahan Terhadap Guncangan Gempa*. Diakses dari <https://www.harianhaluan.com/lifestyle/109811897/bikin-tidur-tenang-inilah-deretan-hotel-termegah-di-padang-tahan-terhadap-guncangan-gempa> pada 17 Mei 2024.
- Wonderful Indonesia. (n.d). *Wisata One Day Trip di Kota Padang, Yuk Coba!*. Diakses dari <https://www.indonesia.travel/id/id/ide-liburan/wisata-one-day-trip-di-kota-padang-yuk-coba.html> pada 15 Mei 2024.
- Yumantoko. 2019. *Kolaborasi Stakeholder Dalam Penanganan Destinasi Wisata Terdampak Bencana Di Taman Nasional Gunung Rinjani (Stakeholder Collaboration in Handling Disaster-based Tourism Destination in the Rinjani Mountain National Park)*. *Jurnal Penelitian Kehutanan Faloak*, 3(1), 15–28. <https://doi.org/10.20886/jpkf.2019.3.1.15-28>